

**DILEMA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA:
DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI DAN KONTRAKSI FISKAL TERHADAP
BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI**

Ardi Nova dan Andre R Daud
Fak. Peternakan Universitas Jambi dan
Fak. Peternakan Universitas Padjadjaran

ABSTRAK. Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu menghadapi dilema dalam menetapkan kebijakan fiskal dalam negeri berkaitan dengan tingginya rasio hutang dengan PDB sehingga menyebabkan keterbatasan dalam hal pembiayaan pemerintah. Selama ini, disain kebijakan fiskal selalu didasarkan atas indikator-indikator makroekonomi Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah; (1) mengevaluasi dampak kebijakan dari kenaikan tingkat pajak dan pembiayaan pemerintah terhadap indikator-indikator makroekonomi Indonesia; (2) membandingkan efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut. Data yang digunakan adalah data time-series 1970-1999. Model ekonometrik dengan persamaan simultan digunakan untuk menganalisis dampak tersebut, yang terdiri dari 8 persamaan (4 perilaku dan 4 identitas). Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan pajak sebesar 10% menghasilkan respon yang negatif terhadap hampir seluruh indikator makro, sementara adanya kenaikan belanja pemerintah sebesar 5% menghasilkan respon positif pada jumlah hutang pemerintah, pendapatan pemerintah, tingkat tabungan dan investasi, meskipun tingkat konsumsi tidak terpengaruhi secara nyata. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspansi fiskal lebih tepat dalam konteks pertumbuhan PDB, meskipun kebijakan tersebut cenderung menghasilkan *crowding-out effect*.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Investasi, *Crowding-out Effect*

ABSTRACT. Indonesia, as a developing country, is always experiencing dilemmatic fiscal policy related to relatively high debt ratio to GDP and the limited availability of government funding. The design of fiscal policy is directed at base of macro economic indicators. The purpose of this article is twofold; (1) evaluating the effect of the rise in tax rate and government expenditure to Indonesian economic indicators and [2] comparing the effectiveness of that kind of policy. Time series data of year 1970-1999 was employed to form the economic model. Simultaneous equation model was preferred to analyze the effect of those fiscal policies; consisting of 8 equations (4 behaviors and 4 identities). The simulation indicated that rising tax to 10% generated a negative impact to almost all economic indicators except government revenue, while 5% rising of government expenditure did not influence private consumption but increased the quantity of foreign debt, government revenue, saving rate and government investment. It could be concluded that expansively fiscal policy

52

would generate more positive impact in the manner of GDP growth although such policy has created the crowding-out effect.

Key Words: *Fiscal Policy, Investment, Crowding-out Effect*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan fiskal merupakan perangkat kebijakan yang dominan dan pemerintahan negara-negara yang sedang berkembang. Perubahan indikator makro yang dijadikan target dari kebijakan fiskal dapat bersifat kontraktif (menurunkan aktifitas perekonomian) maupun ekspansif (stimulus ekonomi). Pengaruh peningkatan pengeluaran pemerintah jika digunakan untuk belanja pemerintah menurut Romer (1996) dalam *Real Business Cycle Theory* hanya bersifat sementara dimana shock peningkatan belanja pemerintah sebesar 1% akan memberikan dampak sementara terhadap kapital (K), labor (L), output (Y), konsumsi (C), dan tingkat upah (w) serta tingkat suku bunga (r). Menurut teori Keynes pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan sasaran untuk mencapai stabilitas makroekonomi, pengurangan ketergantungan pada bantuan luar negeri serta pemerataan pendapatan antar golongan, yaitu melalui instrumen pajak dan subsidi (Hill, 2001).

Menurut Damajanti (1999) utang luar negeri dan penanaman modal asing dibutuhkan untuk membiayai investasi pemerintah (G) dan swasta (I) yang kebutuhan dananya tidak dapat disediakan dari mobilisasi dana dalam negeri, baik yang bersumber dari pajak (T) maupun tabungan masyarakat (S). Easterly & Hebbel (1993) mengkaji hubungan antara defisit fiskal dengan kinerja makroekonomi dinegara-negara sedang berkembang dan hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang saling memperkuat satu sama lain (*self-reinforcing*). Pengelolaan fiskal yang baik akan menjaga akses terhadap pinjaman luar negeri dan menghindari *crowding-out investasi swasta sementara stabilisasi* pertumbuhan anggaran dan memperbaiki posisi fiskal pemerintah tetapi dalam jangka panjang akan terjadi *trade-off antara defisit fiskal dan inflasi yang berarti* jika defisit dibiayai dengan pencetakan uang akan menyebabkan peningkatan laju inflasi.

Hasil studi Gould (1983) tentang hubungan tingkat pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya korelasi positif dimana semakin besar pengeluaran pemerintah maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Ram (1986) menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan hasil identifikasi menunjukkan dua saluran pengaruh pengeluaran pemerintah atas pertumbuhan agregat yaitu *externality effect dan differential productivity effect yang menghubungkan produktifitas relatif dari faktor yang* dipergunakan disektor publik. Sedangkan menurut Saunders (1985) dan Smith (1985) terdapat korelasi negatif antara tingkat pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi.

Keseimbangan fiskal meskipun menjadi indikator penting untuk penilaian makroekonomi, namun negara-negara sedang berkembang umumnya mengalami defisit anggaran (*budget deficit*) yang berkelanjutan akibat masalah kebijakan pemerintah. Akumulasi pinjaman yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran dari waktu ke waktu tersebut merupakan hutang (*debt*) pemerintah, tetapi akan menjadi beban bagi pemerintah masa akan datang untuk membayarnya. Rasio hutang pemerintah terhadap PDB diperkirakan mencapai 72,3% (IMF, 2000) dan untuk tahun 2004 pemerintah mengusahakan rasio tersebut turun mendekati angka 60% serta pada tahun 2005 diusahakan mencapai rasio ideal yaitu lebih kecil dari 60% (Irwanto, 2003).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal (peningkatan T dan G) pada kondisi defisit anggaran terhadap beberapa indikator ekonomi Indonesia.
2. Untuk membandingkan efektifitas kedua bentuk kebijakan dalam mempengaruhi berbagai indikator ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data *time series* dari tahun 1970-1999 yang bersumber dari beberapa instansi yang terkait yaitu Bank Indonesia, Departemen Keuangan, BPS, BKPM, Bank Dunia. Model persamaan simultan dalam analisis kebijakan fiskal terdiri dari 8 persamaan (4 perilaku dan 4 identitas) dengan 8 *endogen variabel*, 12 *predetermined variable*, 8 *exogen variabel* dan 4 *lag endogenous variabel*. Persamaan perilaku dan identitas dalam model mencakup persamaan konsumsi swasta dan investasi swasta, total pengeluaran swasta, investasi pemerintah, suku bunga deposito, jumlah hutang luar negeri, pengeluaran pemerintah dan gross domestik yaitu:

$$\begin{aligned}
 KOSW_t &= a_0 + a_1 TAXES_t + a_2 INFL_t + a_3 GDPC_t + a_4 LKOSW_{t-1} + U_1 \\
 INSW_t &= b_0 + b_1 SKBD_t + b_2 INFL_t + b_3 TAXGR_t + b_4 LINSW_t + U_2 \\
 PGSW_t &= INSW_t + KOSW_t \\
 INPT_t &= c_0 + c_1 GDP_t + c_2 SKBD_t + c_3 INFL_t + c_4 LINPT_t + U_3 \\
 SKBD_t &= d_0 + d_1 INSW_t + d_2 INPT_t + d_3 GDP_t + d_4 LSKBD_t + U_4 \\
 JHLN_t &= e_0 + e_1 SBIN + e_2 EXR_t + e_3 PGP_t + e_4 EXPO_t + e_5 LJHLN_t + U_5 \\
 PGPT_t &= INPT_t + KOPT_t \\
 GDP_t &= INSW_t + KOSW_t + PGPT_t
 \end{aligned}$$

dimana:

$KOSW_t$ = Konsumsi Swasta atau Rumah Tangga (Rp. Trilyun)

$INSW_t$ = Investasi Swasta (Rp. Trilyun)

$PGSW_t$ = Pengeluaran Total Swasta (Rp. Trilyun)

$INPT_t$	= Investasi pemerintah (Rp. Trilyun)
$SKDB_t$	= Suku Bunga Deposito (% / tahun)
$JHLN_t$	= Penerimaan Hutang Luar Negeri (Rp. Trilyun)
$PGPT_t$	= Total Pengeluaran Pemerintah (Rp. Trilyun)
GDP_t	= Gross Domestic Product (Rp. Trilyun)
$TAXES_t$	= Pajak Penerimaan Pemerintah
$INFL_t$	= Tingkat Inflasi (% /tahun)
$GDPC_t$	= Pendapatan Perkapita (GDP/Jumlah Penduduk)
$LKOSW_t$	= Konsumsi Swasta Tahun Lalu
$TAXGR_t$	= Persentase Perubahan Pajak (% /tahun)
$LINSW_t$	= Investasi Swasta Tahun Lalu.
$LINPT_t$	= Invetasi Pemerintah Tahun Lalu
$LSKBD_t$	= Suku bunga tahun lalu
$SBIN_t$	= Suku Bunga Internasional (persentase/tahun)
EXR_t	= Nilai Tukar (rupiah terhadap dollar)
$EXPO_t$	= Nilai Ekspor (trilyun)
$LJHLN_t$	= Penerimaan Hutang Pemerintah Tahun Lalu
$KOPT_t$	= Konsumsi Pemerintah (Rp. Trilyun)

Identifikasi model guna menentukan apakah model *over identified dengan* pendugaan model menggunakan 3SLS (*Three Stage Least Squares*). Untuk mengetahui apakah variabel penjelas secara bersama-sama dan secara parsial berpengaruh terhadap variabel endogen digunakan uji-F dan uji-t. Validasi model untuk simulasi alternatif kebijakan dengan kriteria statistik *Root Means Square Error (RMSE)*, *Root Means Percent Square Error (RMSPE)* dan *Theil's Inequality Coefficient (U)* (Pindyck and Rubinfeld, 1991). Analisis simulasi yang dilakukan adalah peningkatan pajak sebesar 10 persen (kontraksi) dan pengeluaran pemerintah sebesar 5 persen (ekspansi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Investasi dan Konsumsi Swasta, Investasi Pemerintah dan Jumlah Hutang Luar Negeri Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi swasta, investasi pemerintah dan jumlah hutang luar negeri seperti Tabel 1. Konsumsi swasta dipengaruhi oleh tingkat inflasi, GDP perkapita dan konsumsi swasta tahun sebelumnya. Pajak pendapatan dan tingkat inflasi memberikan dampak negatif terhadap konsumsi swasta sedangkan GDP perkapita memberikan dampak positif. Peningkatan pajak akan menyebabkan berkurangnya pendapatan riil masyarakat sehingga akan menurunkan konsumsi baik pada level rumah tangga maupun swasta (perusahaan). Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga dan sama seperti halnya pengaruh pajak pendapatan maka kenaikan harga menyebabkan turunnya pendapatan riil dalam masyarakat sehingga akan terjadi penurunan konsumsi swasta. Variabel GDP

perkapita berkorelasi positif dengan konsumsi swasta yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akan diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Lag konsumsi swasta positif mengindikasikan bahwa secara umum terjadi peningkatan konsumsi swasta dari tahun ke tahun.

Suku bunga deposito meskipun tidak signifikan mempengaruhi investasi swasta tetapi berkorelasi negatif. Semakin tinggi tingkat suku bunga deposito akan menurunkan investasi swasta karena kenaikan tingkat suku bunga deposito akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku komersial dan suku bunga yang tinggi tidak kondusif bagi suatu investasi. Pada suku bunga tinggi kredit investasi oleh dunia usaha akan menurun karena adanya kesulitan untuk mengembalikan kredit investasi yang mereka pinjam. Pada sisi lain kenaikan suku bunga deposito akan mendorong masyarakat untuk cenderung menyimpan uangnya di bank dibanding melakukan investasi. Peningkatan tabungan (*saving*) tidak akan diikuti oleh kenaikan investasi jika suku bunga komersial tetap tinggi. Tingkat inflasi dan pertumbuhan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap investasi. Tingkat inflasi dan pajak yang tinggi akan menghambat investasi swasta sehingga dalam suatu kebijakan pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya laju inflasi yang berlebihan dan dalam kondisi tertentu untuk menarik investasi swasta pemerintah perlu melakukan insentif dalam bentuk keringan pajak. Pendapatan perkapita meskipun tidak signifikan mempengaruhi investasi swasta tetapi dengan kenaikan pendapatan akan mendorong kenaikan investasi. Hal ini terutama diakibatkan karena peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan agregat demand sehingga akan mendorong terjadinya investasi oleh sektor swasta. Investasi swasta dari tahun ke tahun secara umum meningkat di Indonesia yang terlihat dari koefisien lag-investasi swasta yang positif.

Investasi pemerintah hanya signifikan dipengaruhi oleh GDP sedangkan faktor lain seperti tingkat suku bunga deposito, tingkat inflasi dan lag-investasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dipengaruhi oleh faktor pasar tetapi sangat tergantung dari ketersediaan dana pembangunan suatu negara. GDP mampu mengindikasikan kemajuan suatu negara dan untuk Indonesia dimana investasi pemerintah masih diperlukan maka besarnya investasi akan sangat tergantung pada penerimaan pemerintah.

Dilema Kebijakan Fiskal di Indonesia: Dampak Kebijakan Ekspansi dan Kontraksi Fiskal Terhadap Beberapa Indikator Ekonomi (Ardi Nova dan Andre R Daud)

Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi dan Investasi Swasta, Investasi Pemerintah dan Jumlah Hutang Luar Negeri Indonesia.

PERSAMAAN/VARIABEL	KOEFISIEN	T- HITUNG	PROB.
KONSUMSI SWASTA			
Intercept	- 24,233	- 2,647	0,014
Pajak Pendapatan	- 0,358	- 1,035	0,311
Tingkat Inflasi	- 0,179	- 2,167*	0,040
GDP per kapita	56,780	3,317*	0,003
Lag-Konsumsi Swasta	0,715	8,224*	0,000
INVESTASI SWASTA			
Intercept	- 10,412	0,722	0,478
Suku Bunga Deposito	- 0,199	- 0,656	0,518
GDP per kapita	28,020	1,922*	0,067
Tingkat Inflasi	- 0,297	- 2,229*	0,036
Pertumbuhan Pajak	- 0,050	- 2,073*	0,050
Lag-Investasi Swasta	0,595	2,708*	0,013
INVESTASI PEMERINTAH			
Intercept	6,346	2,192	0,038
Gross Domestik Produk	0,037	2,873*	0,008
Suku Bunga Deposito	- 0,255	- 1,452	0,159
Tingkat Inflasi	- 0,093	- 1,699	0,102
Lag-Investasi Pemerintah	0,300	1,497	0,147
JUMLAH HUTANG LUAR NEGERI			
Intercept	0,709	0,674	0,507
Suku Bunga Internasional	- 0,160	- 1,708	0,101
Exchange Rate	1,458	2,776*	0,011
Total Pengeluaran Pemerintah	0,182	2,815*	0,010
Jumlah Ekspor	- 0,091	- 2,646*	0,014
Lag-Hutang Pemerintah	0,723	3,395*	0,003

Keterangan: *) signifikan pada tingkat kepercayaan 90%

Investasi pemerintah dari tahun ke tahun secara umum terus mengalami kebijakan dan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menstimulus

aktivitas ekonomi masih besar dan belum dapat diserahkan pada swasta. Investasi pemerintah biasanya berupa *autonomous investment yang biasanya* dilakukan untuk proyek investasi yang membutuhkan dana besar dan lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat meskipun kadang-kadang aspek profit juga dipertimbangkan. Orientasi investasi seperti ini menyebabkan besarnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak tergantung pada tingkat suku bunga dan tingkat inflasi yang terjadi.

Suku bunga internasional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah hutang luar negeri Indonesia tetapi faktor nilai tukar (*exchange rate*), *total* pengeluaran pemerintah dan ekspor serta hutang tahun sebelumnya berpengaruh signifikan. Hutang pemerintah tidak terlalu mengacu pada suku bunga internasional tetapi lebih mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan negara kreditor tetapi dalam kenyataannya tetap menjadi pertimbangan dalam penentuan pinjaman. Pinjaman diterima oleh pemerintah Indonesia yang dikonversikan dalam rupiah dan pergerakan nilai tukar yang semakin terdepresiasi menyebabkan semakin tinggi nilai tukar atau semakin terdepresiasi rupiah maka jumlah pinjaman diterima pemerintah akan semakin meningkat.

Semakin besar total pengeluaran pemerintah menyebabkan semakin banyaknya dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan dana pembangunan yang mengalami defisit. Pertumbuhan penerimaan pemerintah dari pajak, migas dan lainnya yang tidak mampu mengimbangi kebutuhan dana untuk pembangunan menyebabkan semakin besarnya defisit anggaran. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut maka alternatif yang dapat dilakukan pemerintah disamping menjual obligasi adalah melakukan hutang melalui lembaga pembiayaan dunia (ADB, World Bank dan IMF), kelompok negara donor seperti CGI (*Consultative Group of Indonesia*) dan secara bilateral langsung seperti Jepang. Kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar, ketidakmampuan untuk menciptakan sumberdana alternatif dari dalam negeri dan FDI yang rendah serta untuk mencapai target pertumbuhan menyebabkan hutang Indonesia semakin besar dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dengan koefisien lag-hutang pemerintah yang bernilai positif dan pertumbuhan hutang luar negeri naik secara signifikan. Pada tahun 2002 hutang luar negeri Indonesia telah mencapai 72% dari PDRB sedangkan kondisi ideal porsi hutang pemerintah adalah dibawah 60% dari PDRB.

Dampak Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Hasil simulasi dampak kebijakan fiskal kontraktif (peningkatan pajak 10%) dan fiskal ekspansif (peningkatan pengeluaran pemerintah 5%) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

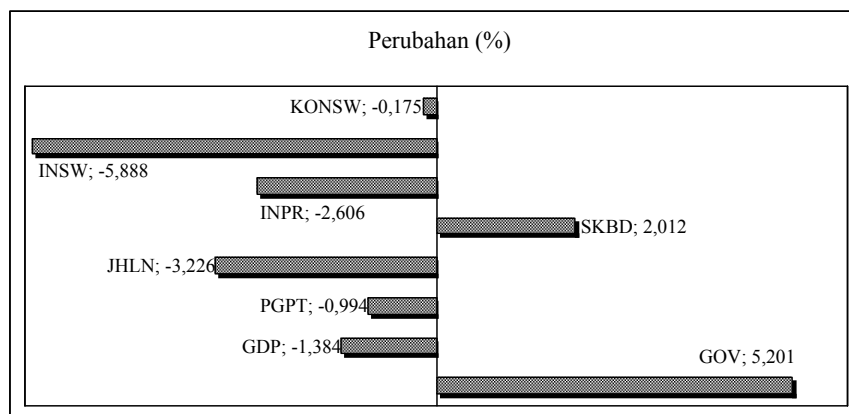
Dilema Kebijakan Fiskal di Indonesia: Dampak Kebijakan Ekspansi dan Kontraksi Fiskal Terhadap Beberapa Indikator Ekonomi (Ardi Nova dan Andre R Daud)

Tabel 2. Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Fiskal Kontraksi dan Ekspansi Terhadap Perekonomian Indonesia.

No	Indikator Ekonomi	Nilai Dasar	Kebijakan	
			T naik 10%	G naik 5%
1	Konsumsi Swasta	137.20	136.96 (-)	137,20 (.)
2	Investasi Swasta	41.44	39.00 (-)	40,98 (-)
3	Investasi Pemerintah	12.28	11.96 (-)	12,33 (+)
4	Suku Bunga Deposito	16.90	17.24 (+)	17,3 (+)
5	Penerimaan Hutang LN	5.89	5.70 (-)	8,76 (+)
6	Total Peng. Pemerintah	32.20	31.88 (-)	33,81 (+)
7	Gross Domestik Product	217.51	214.50 (-)	221,95 (+)
8	Penerimaan Pemerintah	16.15	16.99 (+)	19,02 (+)

Keterangan: Tanda (+/-) menunjukkan arah perubahan akibat kebijakan fiskal.

Hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa peningkatan pajak sebesar 10% memberikan dampak negatif hampir pada seluruh indikator ekonomi kecuali penerimaan pemerintah. Perubahan indikator ekonomi akibat kebijakan fiskal kontraktif dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

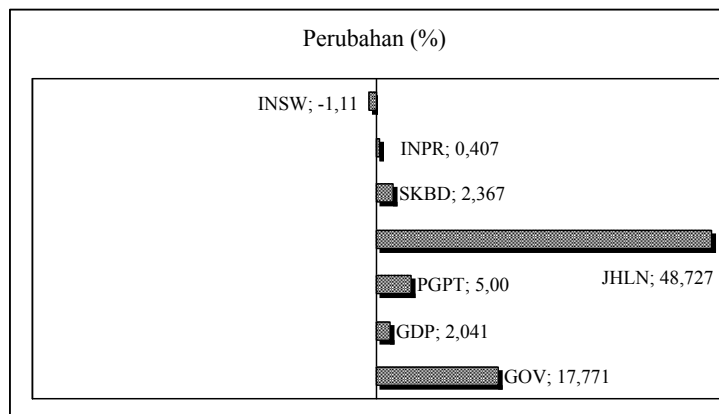


Gambar 1. Perubahan Indikator Ekonomi Sebagai Dampak Kebijakan Peningkatan Pajak 10%

Penurunan konsumsi swasta terjadi akibat kenaikan pajak akan mengurangi pendapatan riil masyarakat ($Y - T$) yang juga dapat diindikasikan melalui penurunan GDP. Penurunan konsumsi swasta secara tidak langsung menyebabkan penurunan investasi swasta karena penurunan permintaan akan

mendorong penurunan permintaan agregat dan menyebabkan adanya penurunan harga sehingga tidak memberi insentif bagi swasta untuk melakukan investasi. Meskipun penerimaan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti dengan pengeluaran dan investasi pemerintah yang lebih besar dan hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan penerimaan dari pajak tidak secara otomatis meningkatkan kedua indikator ekonomi tersebut. Peningkatan penerimaan dari pajak akan lebih banyak digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran yang terjadi dan ketergantungan dari luar negeri yaitu semakin berkurangnya penerimaan pemerintah dari hutang luar negeri. Penurunan pendapatan riil dalam masyarakat juga akan menyebabkan menurunnya tingkat tabungan (S) karena permintaan uang untuk transaksi akan semakin meningkat. Penurunan tingkat saving akan mendorong sektor perbankan untuk menaikkan tingkat suku bunga termasuk suku bunga deposito guna mempertahankan tingkat tabungan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan tabungan (S) dan investasi (I). Pada sisi lain peningkatan suku bunga kembali menyebabkan penurunan investasi swasta sehingga akan menyebabkan terjadinya *crowding out* pada investasi.

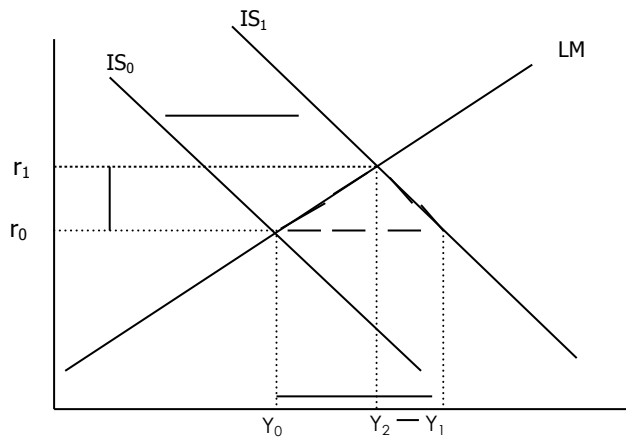
Dampak negatif kebijakan kontraksi fiskal terbesar terjadi pada penurunan investasi swasta yang mencapai 5,888%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat tergantung pada sektor konsumsi, sedangkan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*growth sustainability*) maka perlu didorong dengan sektor investasi swasta. Hal ini menyebabkan kebijakan peningkatan pajak tidak cocok untuk perbaikan kondisi makroekonomi Indonesia terutama jika tidak diikuti dengan kebijakan lain yang mampu mendorong berkembangnya investasi swasta. Pada kondisi resesi menurut Romer (1996) dibutuhkan suatu insentif pajak kredit investasi yang bersifat sementara (*temporary*) untuk *stimulus* bagi peningkatan agregat karena akan mampu mendorong firma untuk investasi. Dampak kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 5% akan berdampak positif terhadap beberapa indikator ekonomi seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Perubahan Indikator Ekonomi Sebagai Dampak Kebijakan Peningkatan Pengeluaran Pemerintah 5%

Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 5% tidak akan mempengaruhi konsumsi swasta tetapi akan meningkatkan jumlah hutang luar negeri, penerimaan pemerintah, suku bunga deposito dan investasi pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah berarti untuk menjaga keseimbangan fiskal maka pemerintah harus menutupi dengan mencari berbagai sumber dana dan jika diasumsikan tidak ada peningkatan penerimaan dari pajak maka untuk menutupi defisit anggaran pemerintah mencari sumber alternatif seperti meningkatkan pinjaman baik dalam maupun luar negeri. Penerimaan pemerintah dari hutang luar negeri semakin besar akibat peningkatan pengeluaran yaitu meningkat sekitar 46,727%. Sumberdana alternatif lain yang dapat digali oleh pemerintah adalah melalui penjualan obligasi pemerintah tetapi dibutuhkan insentif bagi para pemilik dana dengan suku bunga obligasi tinggi. Hal ini akan mendorong kenaikan suku bunga deposito karena penetapan suku bunga oleh perbankan selalu mangacu pada kebijakan suku bunga oleh Bank Sentral (SBI). Semakin tinggi suku bunga SBI maka akan semakin tinggi tingkat suku bunga komersial dan hal ini akan berpengaruh negatif terhadap investasi. Investasi pemerintah mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan investasi swasta, sementara keterbatasan anggaran pembangunan investasi swasta sangat diperlukan.

Penurunan investasi swasta akan berdampak negatif karena sektor ini merupakan akselerator bagi suatu perekonomian. Penurunan investasi swasta ini merupakan efek dari terjadinya *crowding out yang mengindikasikan bahwa uang ditangan swasta akan lebih efektif dibanding uang ditangan pemerintah*. Proses terjadinya *crowding out didalam perekonomian nasional digambarkan sebagai berikut*.



Gambar 3. Mekanisme "Crowding out" Investasi

Pada Gambar 3 terlihat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS_0 ke IS_1 . Keseimbangan pada (r_0, Y_1) , pada keseimbangan ini terjadi kelebihan output. Karena ekspansi pendapatan maka permintaan akan uang meningkat sehingga mendorong tingkat suku bunga juga meningkat dari r_0 ke r_1 . Peningkatan suku bunga ini akan menurunkan tingkat investasi sebesar 1.12%, dengan demikian maka output juga akan menurun tetapi penurunan output ini lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan output akibat peningkatan pengeluaran pemerintah sehingga titik keseimbangan berada pada (r_1, Y_2) . Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan GDP yang menjadi tujuan peningkatan pengeluaran pemerintah tidak akan terjadi secara penuh (*fully*) tetapi akan lebih rendah akibat adanya *crowding out pada investasi*.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain adalah:

1. Kebijakan fiskal kontraksi (T) naik 10% berdampak negatif terhadap indikator ekonomi terutama penurunan investasi swasta dan *Gross Domestic Product*. Penurunan konsumsi akan menurunkan permintaan sehingga harga yang terbentuk lebih rendah dan kenaikan tingkat suku bunga merupakan dua hal yang menghambat pertumbuhan investasi swasta sehingga GDP akan turun.
2. Kebijakan fiskal ekspansi (G) naik 5% tidak secara penuh berdampak positif pada kenaikan GDP karena adanya efek 'Crowding Out' yaitu penurunan investasi swasta akibat kenaikan suku bunga. Kenaikan G akan meningkatkan

defisit anggaran dan untuk menutupi defisit pemerintah menggunakan pinjaman hutang luar negeri sebagai sumber dana.

3. Kedua kebijakan pada dasarnya tidak efektif bagi perbaikan perekonomian Indonesia terutama untuk meningkatkan investasi swasta dalam mengatasi krisis ekonomi yang masih berlangsung sampai saat ini.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis dan simulasi dampak kebijakan kontraksi dan ekspansi fiskal maka beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah:

1. Peningkatan penerimaan pajak masih dapat dilakukan tetapi tidak dengan meningkatkan tingkat pajak melainkan dengan lebih mengintensifkan penarikan pajak dan meminimalisir berbagai kebocoran yang terjadi.
2. Peningkatan pengeluaran pemerintah harus dilakukan secara bijaksana tetapi akan lebih efektif jika peningkatan pengeluaran ditujukan untuk aktifitas produktif seperti perbaikan dan pengembangan infrastruktur.
3. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang diikuti dengan perbaikan manajemen pembangunan akan sangat produktif dengan meminimalisir berbagai kebocoran seperti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, N. S., 2000. Strategi Kebijakan Ekonomi Indonesia. *"Mungkinkah Krisis Ekonomi Berakhir"*, Pusat Studi Indonesia - Universitas Terbuka, Jakarta.

Easterly, W. and Klaus S. H. 1993. Fiscal Deficits and Macroeconomic Performance in Developing Countries. *The World Bank Research Observer*, Vol. 8, No. 2 (July). The World Bank.

Hill. H. 2001. Ekonomi Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada

Irwanto F., 2003. Tahun 2004, Momentum Perekonomian Indonesia, *Catatan Akhir Tahun Bidang Ekonomi*, *Harian Umum Kompas 15 Desember 2003 Hal. 49*, Jakarta.

Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition. The MacMillan Press Ltd. London.

Landau, D. 1986. Government and Economic Growth in the Less Developed Countries. An Empirical Study for 1960-1980. *Economic Development and Cultural Change* Vol. 35, No. 4 (October).

Mankiw, G. 1997. Macroeconomics. Worth Publishers, New York.

Pindyck, R. S and D. L. Rubinfeld. 1991. Econometric Models and Economic Forecasts. Third Edition. McGraw-Hill Inc. New York.

Ram, R. 1986. Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data. American Economic Review, Vol. 76 No. 1 (March).

Romer, D. 1996. Advanced Macroeconomics, The McGraw-Hill Companies, Inc. Newyork.

Siregar, H. 2003. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2002 "Indonesia Terkini". Brighten Institute Vol. 1 No. 01 Maret 2003, Jakarta.

Suhartono, 2003. APBN 2004, Besar Pasak Daripada Tiang?. *Catatan Akhir Tahun Bidang Ekonomi, Harian Umum Kompas 15 Desember 2003 Hal. 48, Jakarta.*